



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 005/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS DAN PEDOMAN  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Kandangan yang tengah membangun Zona Integritas WBK dan WBBM maka harus dihindari terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
  2. Bahwa potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang professional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.
  3. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka dipandang perlu melakukan



perubahan terhadap Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan terdahulu.

4. Bahwa yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - b. Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
  - f. Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019, Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Umum;
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS DAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024**


**KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor W15.U2/11/SK/KPN/01/2023 Tentang Penunjukkan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

**KEDUA** : Menunjuk Hakim dan Pejabat dalam lampiran ini sebagai Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut dalam daftar lampiran keputusan ini. Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, Form Laporan Benturan Kepentingan, Format Hasil Pemeriksaan Benturan Kepentingan dan Formulir Bebas Benturan Kepentingan sesuai daftar lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 005/KPN.W15.U2/SK/1/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024**

Pembina : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.

(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Dwi Suryanta, SH.MH.

(Hakim)

Sekretaris : Ana Muzayyanah, SH.

(Hakim)

Anggota : - Zuraidah, SH.

- Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom.

- Rafiqah, ST.

- Surya Harry Prayoga, SH. MH.

- Herarias

- Hudhan Mufazhal, S.I.P.

- Ayu Prasetyaningtyas P. SE.



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor 005/KPN.W15.U2/SK/1/2024  
Tanggal 02 Januari 2024

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

**B. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** petunjuk pelaksana ini sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.



**Tujuan** ditetapkannya pedoman ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

#### C. Ruang Lingkup

**Ruang lingkup** petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

#### D. Pengertian

**Benturan kepentingan** adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

**Kepentingan Pribadi** adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

**Hubungan Afiliasi** adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

**Korupsi** adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



**Kolusi** adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

**Nepotisme** adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

**Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

## BAB II

### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Prinsip Dasar

**Prinsip dasar** dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

#### B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

**Identifikasi bentuk benturan kepentingan** yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB , antara lain:

- Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
- Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
- Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;



- Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- Penyalahgunaan jabatan;
- Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

**Identifikasi Jenis benturan kepentingan** yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB , antara lain:

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
3. Pemberian izin yang diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

**Identifikasi sumber benturan kepentingan** yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandungan Kelas I B , antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;





3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan

Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

### C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kandangan kelas I B ;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka



kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Kandungan Kelas I B ;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Kandungan kelas I B, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB harus mendasarkan diri pada:
  - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
  - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
  - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
  - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan





kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (*Whistle Blowing System*).

5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb :


- Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- Membatasi akses informasi;
  - Mutasi;
  - Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
  - Pengunduran diri dari jabatan.

#### E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

#### F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB <b>NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA</b>
---	--



LAMPIRAN III

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 005/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**FORM LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

di -

Tempat

Merujuk pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 005/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tahun 2024 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Tim Benturan Kepentingan. Berikut disampaikan kondisi benturan kepentingan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB untuk dimintakan telaahan kondisi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Uraian Benturan Kepentingan :

Penyebab :

Status Penanganan :

<input type="checkbox"/>	Sudah ditindaklanjuti
--------------------------	-----------------------


Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kandangan, .....,..... 2024

Pelapor

(.....)

\*) diisi oleh ketua tim benturan kepentingan

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB <b>NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA</b>
---	--



LAMPIRAN IV

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 005/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**FORMAT HASIL PEMERIKSAAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

NIP :

atasan langsung dari pegawai yang terkait benturan kepentingan :

Nama :

Jabatan :

NIP :

dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan Benturan Kepentingan di unit kerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B atas kondisi yang dialami pegawai tersebut diatas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pegawai tersebut diatas berada dalam situasi Benturan Kepentingan dalam hal :

**(uraian nama kegiatan/transaksi/aktivitas)\*).**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut agar dapat dipertimbangkan tindakan lanjutan yaitu :

**(uraian tindakan)**

Pemeriksa,

Ketua Tim


Nama :

NIP :

TTD :

.....

\*) coret yang tidak perlu

 Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



LAMPIRAN V

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 005/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**SURAT PERNYATAAN  
BEBAS DARI BENTURAN KEPENTINGAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bawah ini;

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Gol.ruang :  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kandangan


Menyatakan dengan sebenarnya bebas dari benturan kepentingan baik terkait pelaksanaan pekerjaan, ataupun dengan atasan langsung sebagai pemberi pekerjaan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Negeri Kandangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kandangan, ..... 2024

Hormat saya,

(.....)

 Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

